



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 (Lt. 9-10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telp. 021-29079177 (Hunting) Fax 021-29079208, 021-29079205

Nomor : 815 /Djmt/B/6/2017
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I
Tahun 2017 DIPA 005.05

Jakarta, 15 Juni 2017

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
Selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Penyusunan LKKL), diberitahukan kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk menginformasikan dan mengkoordinir Satuan Kerja di wilayah Saudara untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga Semester I Tahun 2017 dan mengirimkan:

1. *Back-up* SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah dan Saldo Awal sudah sesuai Audited;
2. *Back-up* SIMAK BMN dan Persediaan satuan kerja dan Wilayah yang berada dalam lingkungan Unit UPT koordinator Wilayah;
3. Rekapitulasi *username* dan *password e-Rekon* satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah;
4. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I tahun 2017 (*softcopy* dalam bentuk *Word* dan *Pdf*);
5. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (*softcopy* dalam bentuk *Excel* atau *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
6. Memo Penyesuaian per Satuan Kerja (*softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
7. Rekapitulasi Daftar Rekening Bank (Bendahara Pengeluaran, dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Perkara) dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani beserta Fotocopy Rekening Koran per 30 Juni 2017;
8. Rekapitulasi data Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga per juni 30 Juni 2017 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilingkungan Mahkamah Agung RI (manual) yang telah diverifikasi dan dilengkapi dokumen pendukung (buku induk perkara, berita acara penutupan kas dan saldo rekening keuangan perkara) dalam bentuk *softcopy*;

9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (*softcopy*);
10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (*softcopy*);
11. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per satker (*softcopy*);

Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2017 yang dimaksud pada nomor 1 s/d 11 di atas, paling lambat dapat diterima pada tanggal 5 Juli 2017 dapat dikirim melalui:

Email : akuntansi.ditjenmiltun@gmail.com (untuk Saiba)
dan umum.ditjenmiltun@gmail.com (untuk Simak-Bmn)
(*softcopy*)
Alamat : Sub Bagian Akuntansi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 9, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By pass Jakarta Pusat 10510 (*hardcopy*).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara



[Handwritten Signature]
Dr. MULYONO,SH.,S.IP.,MH

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
5. Arsip

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor : 815 /Djmt/B/6/2017

Tanggal : 15 Juni 2017

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
10. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
11. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
12. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang
13. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
14. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
15. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
16. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
17. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
18. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
19. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang
20. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
21. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
22. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
23. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
24. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
25. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
26. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
27. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
28. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara




Dr. MULYONO,SH.,S.IP.,.MH